

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

#### **5.1.1 Dinamika ancaman non-militer dari ALKI II.**

Bahwa dalam domain pertahanan selalu berangkat dari ancaman khususnya dalam penelitian ini adalah ancaman non-militer di ALKI II faktanya merupakan kewenangan K/L sebagai komponen utama. Namun bukan berarti TNI AL tidak memiliki kewenangan juga karena, apabila dianalisa dari sifatnya, *multi-domain warfare* yang hegemonis maka ancaman non-militer ini akan memberikan dampak yang pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan strategis ALKI II. Mengacu dari letak geografisnya memang ALKI II sangat memungkinkan menjadi sarana masuknya ancaman non-militer aktual dan potensial yang harus diantisipasi berupa: Ancaman pelanggaran Izin/Dokumen; Penyelundupan Barang; *Illegal Mining*; Perampokan/Pencurian; dan Pelanggaran Wilayah IUU *Fishing*.

#### **5.1.2 Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman Menghadapi ancaman non-militer Untuk Mengamankan IKN**

Selanjutnya dalam upaya menghadapi ancaman non-militer di IKN perlu disusun strategi pertahanan perairan pedalaman yang menggunakan model strategi Lykke *Means*: kondisi geografi Kalimantan timur, Kebijakan pertahanan, interoperabilitas lembaga negara yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan laut kawasan IKN, dengan pertimbangan *maritime security*. *Ways*: Memaksimalkan SPLN, untuk mencapai penguasaan *sea control* yang *absolut*, lewat Bakamla, Satuan Penjaga Laut dan Lanal BPP, dalam melaksanakan patroli atau PAM sungai Samarinda dan PAM Laut dengan unsur-unsur KRI dan unsur-unsur Bakamla. Dan *Ends*: Menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN. Memisahkan dua CoG ekonomi dan politik, pemerataan pembangunan nasional. Terbangunnya kesiapan tempur

yang dimiliki TNI satuan militer penyangga keamanan dan pertahanan IKN, desentralisasi logistik pertahanan. Relokasi satuan TNI AL ke IKN.

Dengan pertimbangan resiko harus bisa menjamin keseimbangan pada *Ways* yaitu pada “penguasaan *sea control yang absolut*” oleh karena harus adanya jalinan Kerjasama atau *interoperability* antara komponen pertahanan dan keamanan maritim yang ada saat ini. Sehingga keseimbangan antara *Means, Ways, Ends* bisa tercapai. Dan tambahan resiko terganggunya proses pembangunan infrastruktur dan sistem pertahanan perairan pedalaman IKN Nusantara sebagai obyek vital nasional. Dan gangguan terhadap pembangunan IKN dalam mengamankan Jalur Logistik di perairan Balikpapan.

## 5.2 Saran

Peneliti menyampaikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait tentang perlunya analisa dan kajian akademis dalam hal penyusunan strategi untuk menjawab dan pemecahan masalah praktis terkait pertahanan Laut. Bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam rangka membangun SPLN agar bisa menjadi lebih sempurna, maka perlu strategi pertahanan perairan pedalaman terwadahi, sehingga tercapai tujuan untuk membangun sinergitas dan interoperabilitas, kekuatan maritim nasional sehingga terwujud *Brown water fleet* yang mampu melaksanakan *Sea Control* pada Kawasan ALKI II, agar dapat menangkal ancaman-ancaman yang membahayakan IKN baru.
- b. Fakta Indonesia sebagai negara maritim yang besar dengan geografi kepulauan, sudah merupakan konsekuensi logis dimana perlu memberikan prioritas pembangunan kekuatan TNI AL di kawasan IKN baru untuk mendukung dan mengamankan integritas kedaulatan maritim.
- c. Mengingat masih sedikitnya penelitian tentang pertahanan perairan pedalaman, maka perlu adanya penelitian lanjutan terkait strategi pertahanan Perairan Pedalaman khususnya di kawasan IKN, sebagai obyek vital nasional yang harus dilindungi.